

NILAI-NILAI TRADISI DAN BUDAYA KERATON SEBAGAI ELEMEN PEMBENTUK STRUKTUR RUANG PERMUKIMAN BALUWARTI SURAKARTA YANG DIBANGUN PADA MASA PAKU BUWANA III (1749-1788M)

Tri Hartanto^{1,3}, Tony Atyanto Dharoko¹ dan Yoyok Wahyu Subroto²

^{1,2}Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada
Jl. Grafika No.2 Kampus UGM, Yogyakarta 55281 Telp 0274 542973

³Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Surakarta
Jl. Walanda Maramis No.31 Cengklik Surakarta 57135 Telp 0271 853824
E-mail: tri.hartanto23@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menggali 'konsep' struktur ruang permukiman Baluwarti, yang berada di dalam kawasan keraton Kasunanan Surakarta berdasarkan elemen-elemen tradisi dan budaya keraton. Peneliti mengkaji sejarah untuk mengungkapkan seperti apakah 'konsep' struktur ruang permukiman Baluwarti yang dibangun pada masa pemerintahan Paku Buwana III (1749-1788M). Permukiman Baluwarti dibangun setelah bangunan inti keraton (nDalem Ageng) yang dibangun pada masa Paku Buwana II selesai. Permukiman ini dibangun dengan mengacu pada paugeran keraton, yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan budaya Jawa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa struktur ruang permukiman tradisional senantiasa menjaga keselarasan dengan alam. Dimana masyarakat pada masa itu tidak hanya memperhatikan elemen fisik saja, namun juga elemen non fisik didalam pembangunan permukimannya. Lebih-lebih keraton dikenal sangat ketat dan konsisten menjalankan falsafah-falsafah Jawa yang diturunkan oleh para leluhurnya. Elemen-elemen non fisik yang berupa nilai-nilai tradisi dan budaya keraton terimplementasi didalam elemen fisik permukiman Baluwarti. Struktur ruang permukiman Baluwarti pun disusun dengan nilai-nilai tradisi dan budaya keraton, dimana tata letak dan bentuk bangunan diatur sedemikian rupa, sehingga keselarasan hubungan antara Raja dengan kawula tetap terjaga sesuai falsafah 'manunggaling kawula gusti'.

Kata Kunci : Baluwarti; konsep; permukiman; ruang, struktur; Surakarta

Pendahuluan

Di era globalisasi sekarang ini, bangsa Indonesia sedang mengalami berbagai keterpurukan karena tidak memegang teguh jati diri bangsa (*nations characters building*). Ada yang berpendapat bahwa jati diri bangsa dan budaya bangsa adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin terpisahkan, karena nilai parameter dari jati diri suatu bangsa adalah budaya bangsa itu sendiri. Banyak orang Indonesia yang tidak mencerminkan kepribadiannya sebagai orang Indonesia, banyak orang Jawa yang tidak mencerminkan kepribadiannya sebagai orang Jawa. Hal tersebut menggambarkan lunturnya bahkan hilangnya budaya bangsa sebagai jati diri bangsa di negeri ini. Untuk membangun kembali jati diri bangsa diperlukan kebersamaan dan kegotong-royongan semua elemen masyarakat. Bidang pendidikan dan kebudayaan diharapkan mampu menjadi elemen utama penggerak dalam membentuk karakter generasi muda yang mau mengerti dan memahami budaya bangsa. Semua unsur lapisan dalam kehidupan berbangsa, seharusnya turut berperan dalam menggali dan merumuskan nilai-nilai luhur/jati diri bangsa, yang bersumber dari kehidupan sosial budaya masyarakatnya.

Penggalan nilai-nilai tradisi dan budaya bangsa di bidang arsitektur dapat dilakukan dengan melakukan riset/ penelitian yang merujuk pada bangunan atau kawasan tradisional yang berada di setiap kota atau daerah, dimana sarat akan nilai-nilai luhur kehidupan sosial masyarakatnya. Sehingga akan diperoleh konsep / teori lokal, yang bisa dijadikan untuk membangun identitas / jati diri bangsa. Kearifan lokal merupakan sistem nilai dan norma, dianut, dipahami, dan diaplikasikan masyarakat lokal berdasarkan pemahaman, pengalaman mereka dalam berinteraksi dan berinterrelasi dengan lingkungan (Tjahyono,1999 dalam Prijono, 2000:6). Bentuk-bentuk budaya, baik yang "tangible" (bentuk permukiman, cara penataan tempat tinggal dan halaman, acara-acara tradisi perkawinan, perayaan keagamaan, dan lain-lain) maupun "intangible" (cerita rakyat, mitos, lagu, tarian, dan lain-lain) dapat

dipelajari, karena bentuk-bentuk budaya ini tidak statis, tetapi mengalami perubahan dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu nilai-nilai kearifan lokal hendaknya dipelajari kemudian dikembangkan untuk membentuk sebuah budaya baru. Bentuk budaya akan selalu dikembangkan dengan baik jika memperhatikan geografis lokasi, sehingga mampu menciptakan sebuah pola baru yang peka terhadap lingkungan lokal yaitu budaya dan iklim (Arifin, 2009:7).

Pemilihan kota Surakarta sebagai lokasi penelitian karena kota ini dikenal sebagai salah satu pusat dan inti kebudayaan Jawa, karena secara tradisional merupakan salah satu pusat pengembangan tradisi Jawa. Bersama dengan Yogyakarta, Surakarta merupakan pewaris Kesultanan Mataram yang dipecah melalui Perjanjian Giyanti, pada tahun 1755. Kemakmuran wilayah ini sejak abad ke-19 mendorong berkembangnya berbagai literatur berbahasa Jawa, tari, seni boga, busana, karya arsitektur, dan bermacam-macam ekspresi budaya lainnya. Pada tahun 1830 di Surakarta didirikan Lembaga Bahasa Jawa atau *Instituut voor het Javaasche Taal* untuk mempelajari kesusasteraan, bahasa dan sejarah Jawa kuno. Setelah masa revolusi dan penghapusan status istimewa, kedua keraton di wilayah Kota Surakarta yakni Keraton Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran berfungsi menjadi penjaga nilai budaya Jawa.

Eksistensi kota Surakarta tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan dua pusat kekuasaan tradisional, yakni Keraton Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Kota Surakarta atau Solo / Sala, tumbuh seiring dengan perpindahan ibukota kerajaan Mataram Islam dari Kartasura pada tahun 1745. Desa Sala / Solo dipilih sebagai ibukota kerajaan yang baru ketika Sunan Paku Buwono II yang memerintah Mataram 1726 -1749 memutuskan memindahkan istananya di Kartasura yang hancur akibat 'geger pecinan'. Hasil *nujum* (prediksi) para waskita kerajaan menyebutkan bahwa kerajaan Mataram akan tetap menjadi kerajaan yang besar dan kekal walau kekuasaan raja tinggal 'samegarang payung', jika istananya dibangun di desa Sala. Sebagai ibukota kerajaan, keraton yang menjadi tempat tinggal raja merupakan pusat yang dikelilingi benteng sebagai "negara" atau *negari*. Di luar benteng lingkungannya disebut *negaragung*, *mancanegara*, dan *pesisiran*.

Benteng yang mengelilingi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat disebut dengan nama benteng Baluwarti. Istilah "baluwarti" sendiri berasal dari bahasa Portugis, yakni 'baluarte', yang berarti benteng. Waktu itu pagar (benteng Baluwarti) berupa susunan bambu selanjutnya diganti menjadi pagar tembok besar dengan ketinggian 6 meter dan ketebalan 2 meter. Kemudian untuk mendukung kekuasaan raja, Sunan Paku Buwono III menciptakan daerah di sekitar *Kedhaton* sebagai daerah pertahanan. Daerah sekitar keraton yang dinamakan Baluwarti, difungsikan sebagai permukiman penduduk, khususnya yang memiliki hubungan keluarga dengan raja, dan penduduk yang mengabdikan pada raja, antara lain bangsawan / pangeran, kerabat raja, dan *abdi dalem* (Soeratman, 1989:32). Keluarga raja tinggal di lingkaran pertama yang dikelilingi benteng yang tinggi. Di lingkaran kedua adalah permukiman yang terdiri *sentana dalem* dan *abdi dalem*, dan dikelilingi oleh benteng Baluwarti.

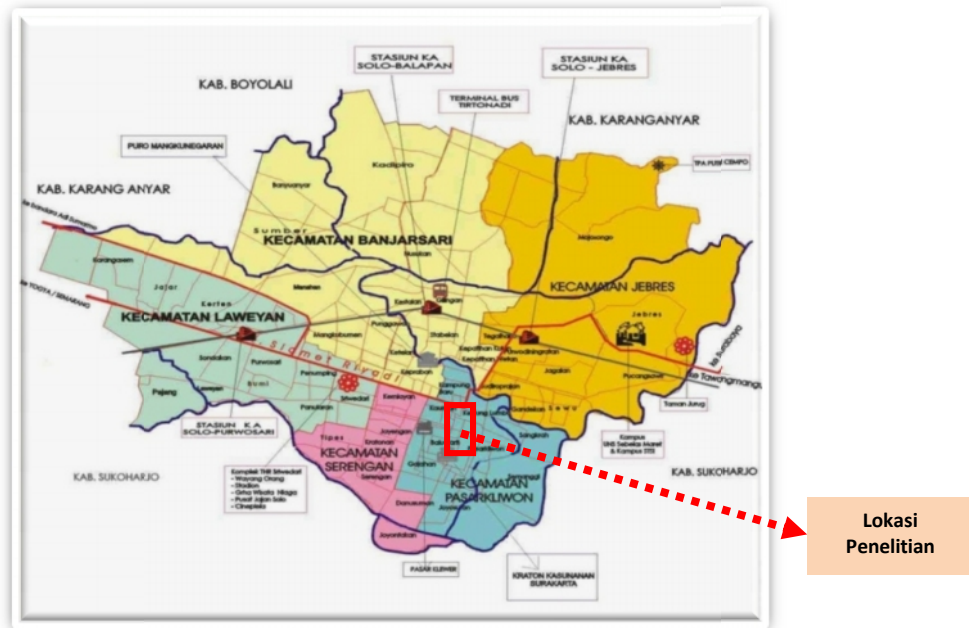
Layout berbagai ibukota di Asia Tenggara merefleksikan konsep kekuatan pusat yang menghubungkan kekuatan kosmos dan menghilang di pinggiran. Pengaruh raja adalah yang paling kuat sebagai pusat politik dan berakhir pada batas kerajaan (Waterson, 1990:95-96). Tata nilai menjadi salah satu pertimbangan penting di dalam struktur ruang masyarakat tradisional. Kepercayaan bahwa roh leluhur ada di puncak-puncak gunung yang tinggi menciptakan sumbu geografis imajiner. Sumbu geografis ini memandang tempat yang memiliki posisi lebih tinggi memiliki nilai ritual di atas tempat yang lebih rendah. Tempat-tempat yang lebih tinggi ini disebut sebagai hulu. Sementara arah yang berlawanan dengan arah gunung memiliki tata nilai lebih rendah disebut *teben*, (Mahaputra, 2005). Sejak lama disadari bahwa budaya memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk struktur ruang permukiman.

Struktur ruang permukiman digambarkan melalui pengidentifikasian tempat, lintasan, dan batas sebagai komponen utama, selanjutnya diorientasikan melalui hirarki dan jaringan atau lintasan yang muncul dalam lingkungan binaan mungkin secara fisik atau non fisik. Untuk membentuk Struktur Ruang tidak hanya *orientation* yang terpenting, tetapi juga objek nyata dari suatu identifikasi. Dalam suatu lingkungan, tempat suci berfungsi sebagai pusat yang selanjutnya menjadi orientasi dan identifikasi bagi manusia, dan merupakan Struktur Ruang (Norberg-Schulz 1979 dalam Sasongko 2005:2-3).

Bahan dan Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah permukiman penduduk (*abdi dalem* keraton) yang berada di dalam kawasan keraton Kasunanan Surakarta. Dimana permukiman ini termasuk dalam wilayah Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Secara administratif Kelurahan Baluwarti terbagi dalam 12 RW dan 38 RT, sehingga untuk sebuah wilayah administrasi kelurahan, ini tidak terlalu luas. Jumlah penduduk kelurahan Baluwarti sebanyak 7.588 jiwa, yang terdiri 1.734 Kepala Keluarga (KK). Jumlah laki-laki 3.637 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 3.951 (2016).

Kehidupan sosial budaya masyarakat di Baluwarti tidak dapat dipisahkan dengan latar belakang sejarah terbentuknya lingkungan permukiman tersebut. Sebagai wadah perikehidupan masyarakat Baluwarti pada awal pembentukan merupakan satu kesatuan dengan keraton Kasunanan Surakarta. Komunitas masyarakat di Baluwarti sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang menghuni daerah ini. Komunitas masyarakat disini tidak dapat lepas dari beradaan keraton Kasunanan Surakarta.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian



Gambar 2. Lokus Penelitian, Kondisi Permukiman Baluwarti Tahun 2016

Elemen-elemen struktur ruang permukiman, seperti tata ruang pola permukiman (aspek fisik), dan tradisi kehidupan sosial budaya masyarakatnya dengan segala ritual (aspek non fisik), masih dipertahankan sebagian masyarakat permukiman Baluwarti hingga sampai saat ini. Latar belakang terbentuknya permukiman Baluwarti, berasal dari ikatan formal masyarakat terhadap keraton. Ikatan ini, berupa status sebagai *abdi dalem* keraton. Hunian dikelompokkan berdasar status, peran, serta pangkat dari masing-masing penghuni. Sehingga permukiman Baluwarti diyakini memiliki nilai-nilai tradisi dan budaya keraton sebagai elemen pembentuk struktur ruang permukiman.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif induktif dengan membaca sejarah (*historical reading*). *Historical reading* digunakan untuk mengetahui konsep awal struktur ruang dari permukiman Baluwarti yang dibangun pada masa pemerintahan Paku Buwana III, melalui buku-buku atau babad yang menceritakan kondisi saat itu, dokumen / arsip / majalah / artikel, dan koran, gambar dalam periode saat itu, dan artefak yang masih ada.

Strategi penelitian dengan metode membaca sejarah (*historical reading*) dalam penelitian ini adalah digunakan untuk mengungkapkan perkembangan permukiman Baluwarti terkait seperti apakah konsep awal permukiman ini dibangun, kemudian melihat perkembangannya dalam perodesasi tertentu hingga kondisi saat ini.

Adapun pendekatan membaca sejarah disini dalam aplikasinya merujuk pada metode *historical research*, dimana sumber sejarah menurut bentuknya digolongkan menjadi tiga, yakni sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda/artefak, (Gottschalk, 1975: 35-36; Kuntowijoyo, 1995: 94-96; dalam Lubis, 2011:7). Kemudian di dalam metode penelitian sejarah, terdapat empat tahapan yang harus dilewati. Keempat tahapan tersebut yakni *heuristik*, kritik atau verifikasi, interpretasi, dan *historiografi* (Lubis, 2011:15-16).

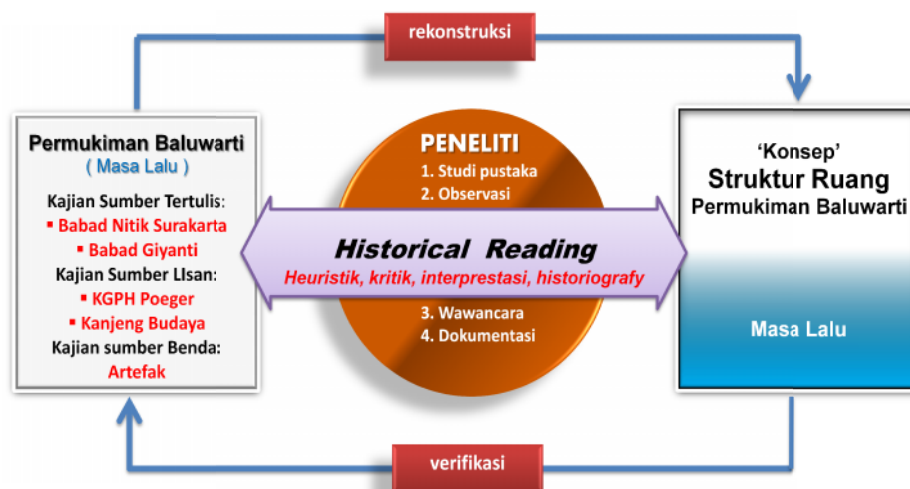
Adapun tahapan dari teknik pengumpulan data dengan metode *historical reading* adalah sebagai berikut:

- 1). Studi pustaka, dilakukan sebagai penunjang dalam memperkaya hasil kajian, beberapa literatur yang terkait dengan tema yang akan diteliti perlu dipelajari. Studi pustaka ini akan memberikan wawasan sebagai sumber pengetahuan dalam mendalami fokus dari obyek penelitian.
- 2). Observasi, dalam melaksanakan penelitian mengenai permukiman Baluwarti perlu melakukan pengamatan langsung terhadap objek kajian, berupa seting fisik, bangunan, dan benda/artefak yang diyakini memberikan informasi terkait keberadaannya.
- 3). Wawancara, merupakan sebuah metode pengumpulan data yang sangat penting, karena kita dapat mengetahui pandangan dan informasi dari masyarakat (orang yang berkompeten) mengenai kondisi struktur ruang permukiman Baluwarti.

Sumber sejarah pada obyek penelitian menurut bentuknya digolongkan menjadi tiga, yakni sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda (artefak):

- a. Untuk menggali sumber tertulis, peneliti akan melakukan kajian berdasarkan *Babad Nitik Kartasura*, *Babad Nitik Surakarta* dan *Babad Giyanti*, dimana dalam ketiga buku tersebut terkait dengan sejarah terbentuknya permukiman Baluwarti pada masa pemerintahan Paku Buwana III, hal ini berdasarkan rekomendasi dari KGPH Poeger selaku PIt. Raja Keraton Surakarta.
- b. Untuk menggali dari sumber lisan, peneliti akan mewawancarai narasumber yang berkompeten yang memiliki pengetahuan sejarah tentang permukiman Baluwarti. Adapun narasumber yang sudah menyatakan kesediaannya selain dari tokoh masyarakat, adalah KGPH Poeger, dan terkait dengan budaya keraton adalah Kanjeng Budaya.
- c. Untuk menggali informasi dan data dari sumber benda (artefak), akan dilakukan dengan mencari informasi dan data, baik di lingkungan keraton Surakarta dan juga dari lokasi penelitian. Tidak menutup kemungkinan peneliti akan berusaha mencari di museum-museum yang memiliki sumber data terkait pembentukan permukiman Baluwarti.

Berikut pada gambar 3. di bawah ini adalah diagram metode kerja didalam *historical reading*, yang peneliti pergunakan sebagai acuan di lapangan:



Gambar 3. Metode Kerja *Historical Reading* (Membaca Sejarah)

Hasil dan Pembahasan

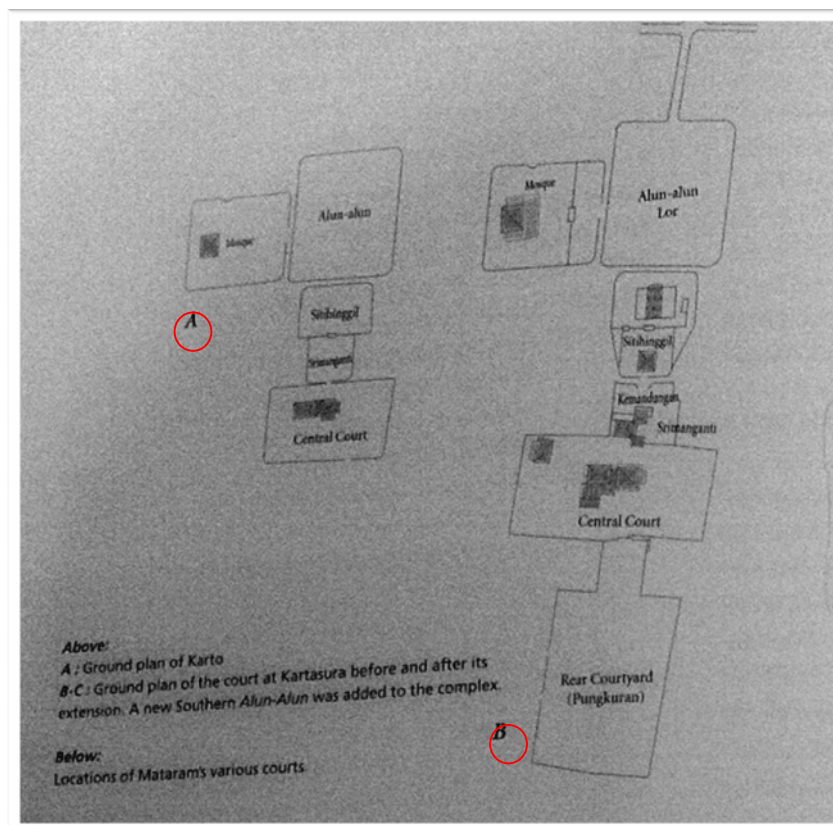
Beberapa kitab Jawa, baik Babad Giyanti (1916, I), Babad Kartasura Pacinan (1940), maupun Babad Tanah Jawi (1941), kisah perpindahan Keraton dari Kartasura ke Surakarta hampir seragam. Ketika Sunan Paku Buwono II (1726–1749) kembali dari Ponorogo, (1742), ia menyaksikan kehancuran bangunan istana. Rusaknya bangunan istana itu disebabkan ulah dari para pemberontak Cina. Bagi Sunan, keadaan tersebut mendorong niatnya untuk membangun sebuah istana yang baru. Ia menghendaki, istana yang baru itu berada di sebelah timur istana lama, dekat dengan sungai Bengawan Sala. Hal ini dilakukan di samping untuk menjauhi pengaruh para pemberontak yang mungkin masih bersembunyi di Kartasura, juga untuk menghapus kenangan buruk kehancuran istana Kartasura.

Sesudah Sunan Paku Buwana II menerima laporan, maka segera memerintahkan kepada Kyai Tohjaya dan Kyai Yasadipura (I), serta R.T. Padmagara, untuk mengupayakan agar desa Sala dapat dibangun istana baru. Ketiga utusan tersebut kemudian pergi ke desa Sala. Sesampainya di desa Sala, mereka berjalan mengelilingi rawa-rawa yang ada disekeliling desa Sala. Akhirnya, mereka dapat menemukan sumber *tirta amerta kamandanu* (air kehidupan, sumber mata air). Hal itu dilaporkan kepada Sunan, dan kemudian Sunan memutuskan bahwa desa Sala-lah yang akan dijadikan pusat istana baru. Sunan segera memerintahkan agar pembangunan istana segera dimulai. Atas perintah Sunan, seluruh *abdi dalem* dan *sentana dalem* membagi tugas: *Abdi dalem* mancanegara *Wetan* dan *Kilen* dimintai balok-balok kayu, jumlahnya tergantung pada luas wilayahnya. Balok-balok kayu tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam rawa di desa Sala sampai penuh. Meskipun demikian belum dapat menyumbat mata air rawa tersebut, bahkan airnya semakin deras.

Sanadyan kelebetana sela utawi balok ingkang ageng-ageng ngantos pinten-pinten ewu, meksa mboten saget pampet, malah toya saya ageng ambalaber pindha samodra. (Tus Pajang, 1940:24-25).

(Walaupun diberi batu ataupun balok-balok kayu yang besar-besar sampai beribu-ribu banyaknya, terpaksa tidak dapat tertutup, bahkan keluarnya air semakin besar dan menyeruap bagaikan samodra).

Demikian akhirnya Kyai Gede Sala memperoleh ganti rugi sebesar sepuluh ribu ringgit (*saleksa ringgit*) dari Sunan. Selanjutnya Kyai Gede Sala bertapa di makam Kyai Bathang. Di dalam bertapa itu Kyai Gede Sala memperoleh "*Sekar Delima Seta*" dan daun lumbu (sejenis daun talas). Kedua barang tersebut dimasukkan ke dalam sumber mata air (*tirta amerta kamandanu*). Sesudah itu dilakukan kerja bakti (*gugur gunung*) menutup rawa. Akhirnya pekerjaan itu selesai dengan cepat. Penghuninya dipindahkan dan dimukimkan kembali di tempat lain ("*wong cilik ing desa Sala kinen ngalih marang ing desa Iyan sami*"). Kemudian pembangunan dimulai dengan menguruk tanah yang tidak rata dan dibuat gambar awal dengan mengukur panjang dan lebarnya ("*ingkur amba dawane*"). Puluhan ribu (*leksan*) buruh bekerja di proyek pembangunan itu. Dinding-dinding pertama dibangun dari bambu karena waktunya mendesak. Adapun desain umumnya mencontoh model Karaton Kartasura ("*anelad Kartasura*") (Lombard, III: 109).

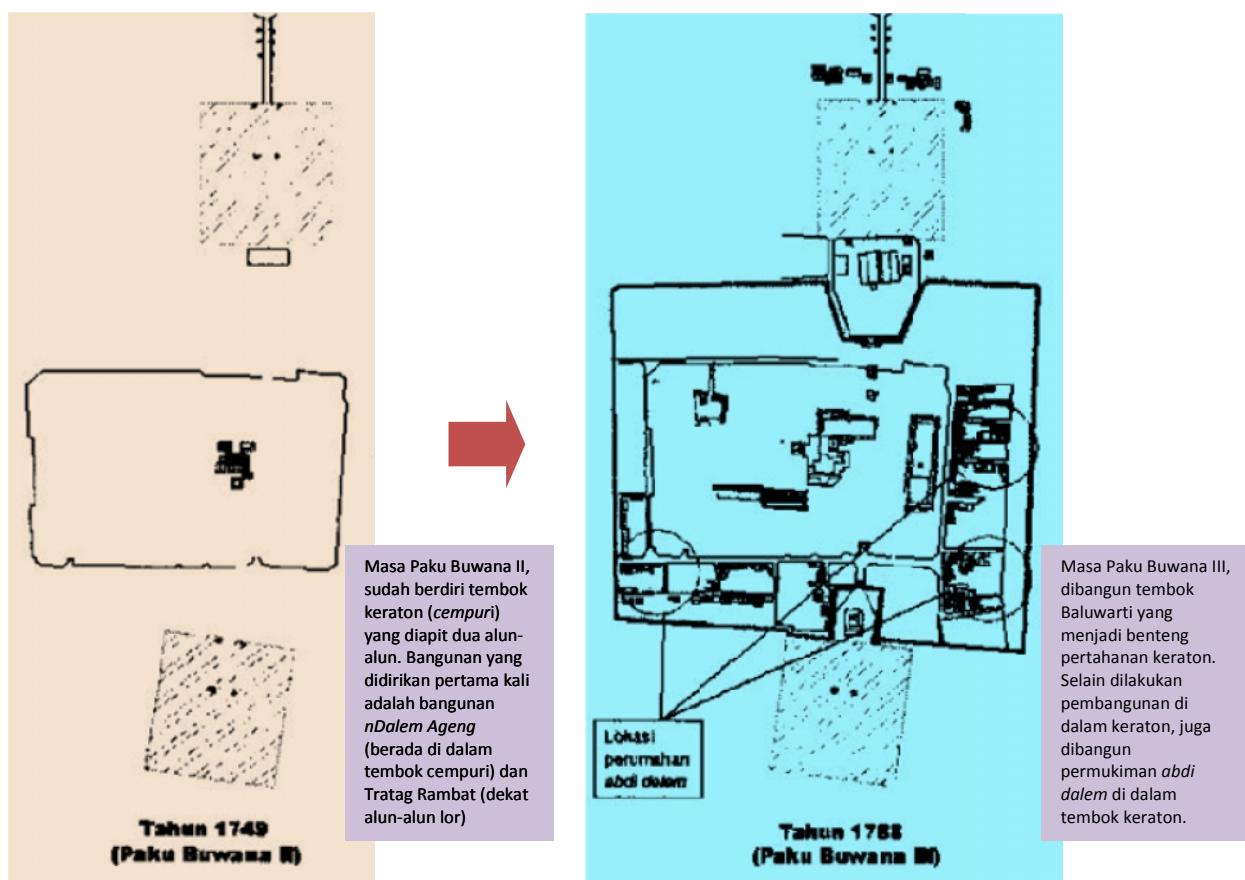


Gambar 4. Model Keraton Surakarta Mengikuti Keraton Kartasura

Inti kebudayaan Keraton Surakarta yang dicetus Paku Buwana I berupa gagasan, hasil olah pikir dan batin manusia berupa perilaku hidup menyembah kepada Tuhan YME dan perilaku hidup sosial budaya (hubungan dengan sesama). Nilai yang terkandung di dalamnya diwariskan pelestariannya dari generasi ke generasi, melalui

proses seleksi nilai tersebut menurut lintasan perjalanan sejarah. Menurut Paku Buwana I, Sri Radya Laksana adalah wujud dan gambaran inti kebudayaan Keraton Surakarta. Arti harfiahnya adalah perilaku lahir dan batin untuk menjunjung tinggi negara. Unsurnya terdiri dari *ratu* (raja), *putra sentana*, *abdi dalem* (punggawa), *kawula* (rakyat), fisik bangunan keraton, pemerintahan, wilayah dan kelompok tetua (pendahulu) yang dihormati. Oleh karena itu, keraton juga sebagai tempat *manunggaling ratu, sentana, abdi* serta *kawula*. Atau bersatunya raja, *sentana, abdi* serta rakyat, (KRMH. Yosodipura,1990:1).

Keraton Kasunanan Surakarta berdiri pada tahun 1745, dan terus mengalami perkembangan seiring dengan pergantian raja yang memimpin pemerintahan keraton, yakni dari masa pemerintahan Paku Buwana II hingga Paku Buwana XII. Perkembangan yang terjadi ternyata masih mengacu pada suatu konsep tata ruang keraton terdahulu yang terus dipertahankan dari masa ke masa. Perkembangan kawasan ditinjau dari variabel fisik, ternyata elemen-elemen fisik kawasan dirintis sejak masa Paku Buwana II. Pemerintahan selanjutnya, mengembangkan dan menyempurnakan pembangunan fisik yang ada, masa puncak perkembangan adalah masa Paku Buwana X. Selain terjadi perkembangan fisik, juga terjadi perubahan fungsi bangunan. Perkembangan kawasan keraton bila ditinjau dari faktor politik, pada masa Paku Buwana II hingga Paku Buwana XI, keraton memiliki kekuasaan di bidang politik pemerintahan. Selanjutnya, masa Paku Buwana XII, keraton kehilangan kekuasaan politiknya, dikarenakan telah bersatunya keraton dengan Pemerintah Republik Indonesia. Perkembangan kawasan keraton bila ditinjau dari faktor budaya, masa Paku Buwana II, adanya budaya untuk meneruskan tata ruang keraton terdahulu. Masa Paku Buwana III hingga Paku Buwana X adalah pembentukan dan penyempurnaan konsep tata ruang keraton. Konsep tata ruang yang terbentuk tersebut terus dipertahankan hingga masa Paku Buwana XII. Kemudian kegiatan upacara adat terus dipertahankan dan dilaksanakan, terlebih pada masa ini terjadi pengembangan upacara adat besar dengan diciptakannya Upacara adat *Kirab Pusaka*, yang menambah ciri khas, karena hanya dilaksanakan di Keraton Kasunanan Surakarta.

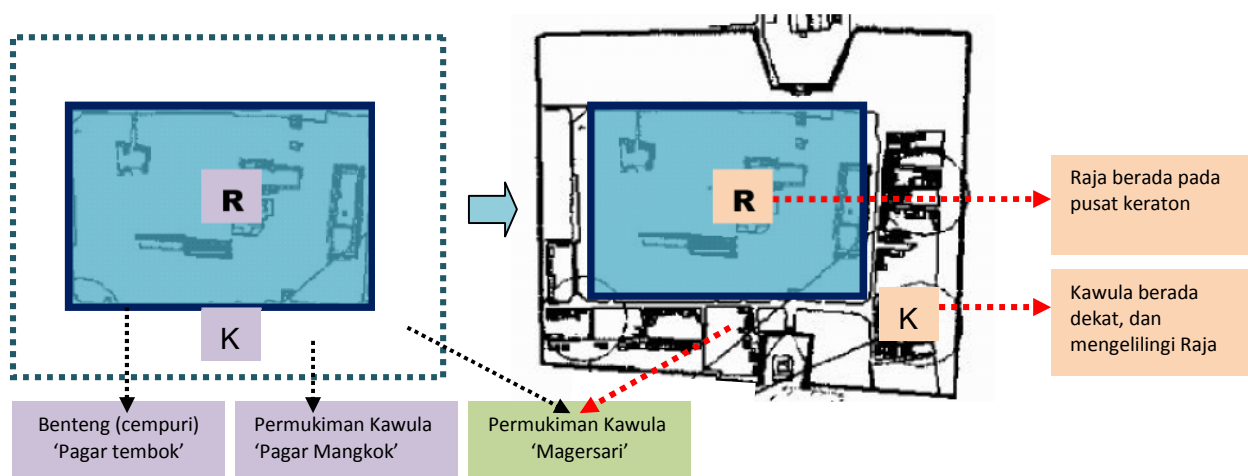


Gambar 5. Perkembangan Pembangunan Keraton Surakarta Masa PB. II – PB. III

Berdasarkan hasil wawancara dengan KGPH Poeger, (2016) bahwa setelah selesai dibangun *nDalem Ageng* bangunan inti keraton, kemudian Sinuhun Paku Buwana II menyampaikan kepada semua *kawula/rakyat* yang mau menempati atau membangun rumah di sekeliling *cempuri* diperbolehkan. Lebih jauh KGPH Poeger menyampaikan bahwa melihat tanah di sekitar *cempuri* dengan benteng keraton Baluwarti masih luas, maka Sinuhun

memperbolehkan ditempati oleh *kawula/rakyat*, baik *abdi dalem*, *sentana dalem* dan *putra dalem*. Tanah yang luas tersebut dikapling-kapling dan diberi pagar tembok untuk faktor keamanan. Pemberian lahan untuk dibangun rumah-rumah *kawula* didasari akan kewajiban raja kepada *kawula/rakyatnya*. Hal ini sesuai falsafah Jawa “*manunggaling kawula gusti*” dalam konteks horisontal yaitu bahwa raja dan rakyat/*kawula* harus senantiasa dekat. Bagi orang Jawa dahulu, pusat dunia ini ada pada raja dan keraton, Tuhan adalah pusat makrokosmos sedangkan raja dianggap perwujudan wakil Tuhan di dunia, sehingga dalam dirinya terdapat keseimbangan berbagai kekuatan dari dua alam. Jadi raja dipandang sebagai pusat komunitas di dunia seperti halnya raja menjadi mikrokosmos dari wakil Tuhan dengan keraton sebagai tempat kediaman raja. Keraton merupakan pusat keramat kerajaan dan bersemayamnya raja karena raja pun dianggap merupakan sumber kekuatan-kekuatan kosmis yang mengalir ke daerah kedaulatannya dan membawa ketentraman, keadilan dan kesuburan wilayah.

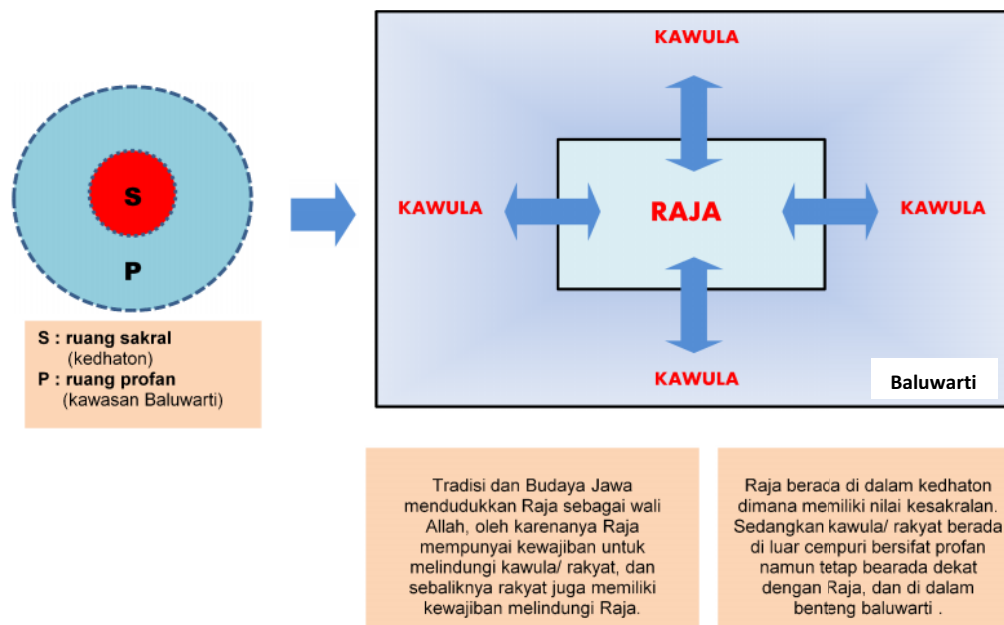
Permukiman ini tentunya sudah diatur dengan *paugeran* atau nilai-nilai hukum adat keraton. Berdasarkan artefak yang ada, wujud dari lansekap pengelompokan tempat tinggal *kawula* yang tercermin didalam nama-nama kampung yang hingga kini masih dapat kita runut. Pun bentuk bangunan yang bercirikan arsitektur tradisional Jawa masih dapat kita lihat dari beberapa bangunan milik *abdi dalem* dan *putra dalem/dalem pangeran* dengan style yang disesuaikan. Pola permukiman disusun mengelilingi cempuri dalam rangka sebagai ‘*pagar mangkok*’ untuk senantiasa ikut mengamankan Raja. Ini ditempuh mengingat falsafah Jawa juga mengajarkan bahwa ‘*pagar mangkok*’ akan lebih kokoh dibandingkan dengan pagar tembok, yang mana wilayah keraton sendiri juga sudah dibuat pagar tembok / benteng yang tinggi dan kokoh. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan *pagar mangkok* adalah Raja yang senantiasa memperhatikan kebutuhan akan *sandang, pangan, dan papan* bagi *kawulanya*, sehingga kebutuhan pokok *kawulanya* sudah tercukupi dengan sendirinya *kawulanya* pun akan senantiasa bertanggungjawab menjaga keselamatan rajanya.



Gambar 6. Perkembangan Pembangunan Permukiman Baluwarti Masa PB. II – PB. III

Sesepakat dengan KGPB Poeger, menurut Kanjeng Budaya (2016) maksud lahan ini diperuntukkan sebagai tempat tinggal *sentana dalem* dan *abdi dalem* adalah dengan pertimbangan bahwa sewaktu-waktu *sentana dalem* dan *abdi dalem*, baik itu pangeran, bupati, prajurit, penari, penabuh dan *abdi* lainnya, jika diperlukan oleh Raja, dapat segera tiba dan menghadap. Para bangsawan dan pejabat tinggi Kraton bertempat tinggal pada lokasi yang terletak di pinggir jalan lingkaran utama, sedangkan para *abdi dalem* menempati rumah tinggal mereka di dalam perkampungan. Permukiman *abdi dalem* di Baluwarti awalnya terdiri dari 5 (lima) kampung, yaitu: (1) Kampung Tamtaman, (2) Kampung Carangan, (3) Kampung Wirengan, (4) Kampung Lumbung, dan (5) Kampung Gambuhan.

Elemen-elemen struktur ruang permukiman, seperti tata ruang pola permukiman (aspek fisik), dan tradisi kehidupan sosial budaya masyarakatnya dengan segala ritual (aspek non fisik), masih dijalankan sebagian masyarakat permukiman Baluwarti hingga sampai saat ini, yang melahirkan kekhasan tersendiri. Kekhasan inilah yang menjadikan lingkungan permukiman Baluwarti yang berada di dalam keraton berbeda dengan permukiman lain (di luar keraton) di Surakarta. Karena warga permukiman Baluwarti (*abdi dalem*) yang berada di dalam keraton diusahakan tetap menjaga tradisi dan budaya keraton (budaya Jawa), dan untuk itu secara berkala diberikan penjelasan terkait nilai-nilai tradisi dan budaya keraton oleh pihak keraton, hal ini seperti yang disampaikan oleh KGPB Poeger kepada penulis, (2016).



Gambar 6. Konsep Struktur Ruang Permukiman Baluwarti Masa PB. III

Kesimpulan

Permukiman Baluwarti dibangun setelah bangunan inti keraton (*ndalem Ageng*) selesai. Atas kehendak Raja Sinuhun Paku Buwana II memberikan hak pakai (*magersari*) tanah keraton kepada semua kawula yang membutuhkan tempat tinggal. Kebijakan ini didasari oleh falsafah Jawa '*manunggaling kawula gusti*' dimana Raja dan *Kawula* / rakyat senantiasa bersatu didalam membangun keselarasan hidup. Didalam pembangunan permukiman Baluwarti ini, tidak terlepas dari tradisi dan budaya keraton sebagai *paugeran* yang senantiasa dijalankan secara turun-temurun dalam setiap sendi kehidupan, termasuk pengaturan bangunan yang terwujud dalam tata letak dan bentuk bangunan yang sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga struktur ruang permukiman Baluwarti yang mulai dibangun pada masa Paku Buwana III sarat dengan nilai-nilai tradisi dan budaya keraton sebagai pembentuk elemen ruangnya baik secara fisik dan non fisik untuk mewujudkan keselarasan dengan alam.

Daftar Pustaka

- Budihardjo, Eko. (1997). "*Jati Diri Arsitektur Indonesia*". Alumni, Bandung
- Doxiadis, CA, (1974). *Action for A Better Scientific Aproach to the Subject of Human Settlements : The Anthropocosmos Model*, Ekistics, 229, 405-412.
- Farkhan, Ahmad. (2002). "*Perubahan Bentuk Dan Struktur Lingkungan Permukiman Di Baluwarti Surakarta*". Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang
- Koentjaraningrat, (2009). "*Pengantar Ilmu Antropologi*", Rineka Cipta, Surabaya.
- Muhajir, Noeng, 2000, *Metodologi Keilmuan*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Radèn Ngabèi Yasadipura I. (1937). "*Babad Giyanti*". Jilid 1, Serie No. 1259 Bale Pustaka - Batawi Sèntèrêm.
- Sasongko, Ibnu. (2005). "Pembentukan Struktur Ruang Permukiman Berbasis Budaya, (Studi Kasus: Desa Puyung - Lombok Tengah)". *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur* Vol. 33, No. 1. Institut Teknologi Nasional, Malang.
- Sri-Hardiyanti, Nurul. (2005). "Studi Perkembangan Dan Pelestarian Kawasan Keraton Kasunanan Surakarta". *Dimensi Teknik Arsitektur*, Vol. 33, No. 1, Desember 2005: 112 – 124
- Soeratman, Darsiti, (1989). *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*, Taman Siswa, Yogyakarta